

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH

Siska Yulia Defitri

Universitas Mahaputra M. Yamin Solok, Indonesia
siskayd023@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether the participation of budget preparation and budget goal clarity and simultaneous partial effect on the performance of local government officials in Solok City Government. The hypothesis in this study are the effect of partially or simultaneously budgetary participation and budget goal clarity on the performance of local government officials in Solok City Government. This type of research is causative. The population in this study are all the people involved in the budget planning SKPD Se-Solok totaling 41 SKPD. The sample selection using purposive sampling. The data used in this study are primary data. Data collection techniques by distributing questionnaires. The data analysis technique used is multiple regression with the help of Statistical Package For Social Science (SPSS). Research shows that participation budgeting and clarity of budget targets positive significant effect on the performance of local government officials. F shows that the budgetary participation and budget goal clarity together or simultaneously significant effect on the performance of local government officials. Results of statistical processing regression analysis showed a significant value on the table F 0.05 is calculated F value 3.145 7.023 0.002 significant. Thus 7.023 F count > F table 3.145 with significant value of 0.002 < 0.05.

Keywords: Participation Budgeting, Clarity Budget Targets and Performance of Local Government Officials.

1. PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Penganggaran merupakan suatu proses yang rumit pada organisasi sektor publik, dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik termasuk diantaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan (Rahayu et al. 2007) dalam (Istiyani, 2009). Anggaran Sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Bastian:2006). Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*Strategic Planning*) suatu organisasi. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah adalah seperangkat hasil yang dicapai oleh aparat pemerintah daerah dan suatu sistem yang bertujuan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Fungsi utama anggaran sektor publik, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, alat menciptakan ruang publik. Kinerja akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran.

Partisipasi Penyusunan anggaran merupakan keterlibatan semua pihak dalam pemberian pendapat, pertimbangan dan usulan dalam mempersiapkan anggaran dan revisi anggaran (Wulandari, 2013). Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu.

Jika dibanding dengan peran partisipasi anggaran, penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*) masih sedikit. Beberapa penelitian mendukung terdapatnya pengaruh yang positif tentang kejelasan dan spesifikasi *task-goal* terhadap komitmen pada sasaran, kepuasan dan pencapaian dari karyawan. Menurut Kenis (1979) dalam Suwandi (2013) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Oleh karena sasaran anggaran pemerintah daerah dinyatakan secara jelas, spesifik dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab yang melaksanakannya.

Hartika Sari Ginting (2009) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara simultan maupun secara parsial partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintahan kabupaten karo. Sedangkan penelitian Bangun (2009) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Rafika Anggraeni (2009) meneliti Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Hasil analisis secara parsial, menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan batu.

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun simultan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran (Mardiasmo, 2002). Anggaran dalam organisasi sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik (*eksekutif*) kepada pemberi wewenang (*legislative*) dapat terlihat dari anggaran. Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Menurut Bastian (2006), anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan, (2) anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, (3) anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, (4) usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang

berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran dan (5) sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD' 45. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPD.

Agar menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat untuk suatu tahun tertentu (Munawar, 2006).

2.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran yaitu tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan oleh individu dalam proses perencanaan anggaran (Milani, 1975) dalam Istiyani (2009). Partisipasi penyusunan anggaran tersebut menunjukkan pada luasnya partisipasi aparat pemerintah daerah. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Argyris (1964) dalam Nor (2007) menyatakan bahwa partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat diartikan sebagai berbagai pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan.

Partisipasi yang baik membawa beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memberi pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme, (2) memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu, (3) dapat meningkatkan kerja sama antar departemen, dan (4) para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain Irvine (1978) dalam Nor (2007).

Menurut Bronwell, (1982) dalam Sarjito, (2007) partisipasi anggaran sebagai proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Partisipasi banyak menguntungkan bagi suatu organisasi, hal ini diperoleh dari penelitian tentang partisipasi. Sedang menurut Sord dan Welsh, (1995) dalam Sarjito, (2007) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi yang lebih tinggi akan menghasilkan moral yang lebih baik dan inisiatif yang lebih tinggi pula.

Partisipasi penyusunan anggaran pada sektor publik terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legislatif saling beradu argumen dalam pembahasan RAPBD. Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan setelah itu Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dengan adanya tanggung jawab

ini maka akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan pemerintah daerah.

Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi kesenjangan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi anggaran dari para pimpinan akan dapat meningkatkan senjangan anggaran.

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Locke dan Lathan (1984) dalam Samuel (2008) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Menurut Kenis (1979) dalam Suwandi (2013) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Oleh karena sasaran anggaran pemerintah daerah dinyatakan secara jelas, spesifik dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab yang melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979).

Menurut Stteers dan Porter (1976) dalam Samuel-(2008) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

- a. Sasaran harus spesifik bukannya samar-samar.
- b. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Menurut Locke dan Lathan (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan:

- a. Tujuan membuat secara terperinci umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
- b. Kinerja menyatakan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur
- c. Standar, menetapkan standar/target yang dicapai.
- d. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
- e. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
- f. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
- g. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi

2.4 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam *strategicplanning* suatu organisasi (Mahsum,2006) dalam Istiyani (2009). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa tujuan atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur.

Penilaian Kinerja adalah proses dimana organisasi mengevaluasi/menilai kinerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka. Byars dan W. Rue (2000) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai proses penentuan dan dan pengkomunikasian kepada karyawan sebagaimana mereka dalam melaksanakan secara ideal, penyusunan rencana perbaikan kinerja. Menurut Raymond (2000)

penilaian kinerja adalah proses dimana organisasi mendapatkan informasi seberapa baik karyawan melaksanakan tugasnya.

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah adalah seperangkat hasil yang dicapai oleh aparat pemerintah daerah dan suatu sistem yang bertujuan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja aparat pemerintah daerah dalam penelitian ini dapat dilihat dari pencapaian program- program berdasarkan target dan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Wayne C. Parker (1993:3) dalam Sadjarto Arja (2000) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran/penilaian kinerja suatu entitas pemerintahan yaitu: Peningkatan kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Operasional Variabel

| No | Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Skala |
|----|--|---|---|---------|
| 1 | Independent Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) | Merupakan keterlibatan semua pihak dalam pemberian pendapat, pertimbangan dan usulan dalam mempersiapkan anggaran dan revisi anggaran. | 1. Keikutsertaan 2. Kepuasan 3. Besarnya Pengaruh 4. Kebutuhan memberikan pendapat | Ordinal |
| 2. | Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) | Menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran program dan kegiatan SKPD dinyatakan secara spesifik, jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran. | 1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka waktu 5. Sasaran 6. Tingkat kesulitan 7. Koordinasi | Ordinal |
| 3. | Dependent Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) | Seperangkat hasil yang dicapai oleh aparat pemerintah daerah dan suatu sistem yang bertujuan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. | 1. Perencanaan anggaran. 2. Pengendalian anggaran. 3. Penilaian kinerja | Ordinal |

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang terlibat dalam perencanaan anggaran di SKPD Se-Kota Solok yang berjumlah 41 SKPD dengan jumlah 172 responden pada lingkungan pemerintah daerah Kota Solok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive Sampling* (pemilihan sampel bertujuan).

Metode ini dipilih karena sampel akan diambil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, dimana target responden adalah aparat pemerintah daerah yang menduduki jabatan pada level menengah keatas yaitu Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, dimana pejabat tersebut mempunyai kegiatan dalam penganggaran di Pemerintah Daerah Kota Solok.

3.3 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, perumusan model *Multiple regression*, koefisien determinasi, uji kesesuaian model (uji F), uji t, dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) seluruh variabel diatas $\alpha = 0,05$ yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

1. Analisis Regresi

Tabel 4.1
 Hasil Analisis Regresi

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1(Constant) | 12.256 | 2.936 | | 4.175 | .000 | | |
| Partisipasi Penyusunan Anggaran | .210 | .071 | .338 | 2.945 | .005 | .998 | 1.002 |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | .170 | .078 | .250 | 2.178 | .033 | .998 | 1.002 |

a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Untuk variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) nilai t hitung adalah $2,945 > t$ tabel 1,998, dan nilai signifikan $0,005 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai positif yaitu 0,338. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga Hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan partisipasi penyusunan anggaran (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nivo Wulandari (2013) yang menyimpulkan Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Finginya partisipasi dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan informasi yang efektif antara atasan dengan bawahan, sehingga komunikasi antara atasan dengan bawahan dapat berjalan dengan lancar.

Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Rafika Anggraeni (2009) yang meneliti tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu dimana hasil analisis secara parsial, menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan batu. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Pelabuhan Batu.

Untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) nilai thitung adalah 2,178 > t tabel 1,998, dan signifikan 0,033 < α 0,05. Nilai koefisien⁺ dari variabel (X2) bernilai positif yaitu 0,250. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga Hipotesis dapat diterima. Artinya bahwa penelitian ini membuktikan Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyusun target-target anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa Pratiwy Suwandi (2013) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh maka penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarias Bangun (2009) yang meneliti tentang Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa analisa secara parsial terdapat satu variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD yaitu tentang kejelasan anggaran.

2. Uji Statistik F

Tabel 4.2
 Hasil Uji Statistik F
 ANOVA^b

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regression | 38.534 | 2 | 19.267 | 7.023 | .002 ^a |
| Residual | 170.081 | 62 | 2.743 | | |
| Total | 208.615 | 64 | | | |

- a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran , Partisipasi Penyusunan Anggaran
- b. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Ftabel pada signifikan 0.05 adalah 3.145. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai F hitung 7.023 yang signifikan pada 0.002. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikan sebesar $0.002 < 0.05$. Karena nilai signifikan 0.002 jauh lebih kecil dari 0.05 maka model regresi yang digunakan sudah dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian.

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H3 dapat diterima. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dido Peto Sifarif (2011), meneliti karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah kota Padang pada SKPD Kota Padang. Responden dalam penelitian ini adalah: eselon I, eselon II, eselon IV di kota padang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.3
 Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | .430 ^a | .185 | .158 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya R Square adalah 0,185. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 18,5% sedangkan 81,5 % ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini seperti: Evaluasi anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Desentralisasi

- [11] Kumpulan Peraturan Keuangan Daerah. 2006. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Beserta Peraturan Pemerintah). Penerbit Deka Mandiri, Jakarta.
- [12] Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Dua. Yogyakarta:Penerbit Andi. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi.
- [13] Maryanti, H. A., 2002. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Tesis*).
- [14] Munawar. 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang sesuai SNA 9 Padang.
- [15] Nor, Wahyudin.2007. Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2008. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- [17] Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
_____. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
_____. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
_____. Permendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Jakarta
- [18] Daerah Tahun Anggaran 2008, Jakarta
- Rahayu, Sri. 2007. Study Fenemologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Propinsi Jambi. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*
- [19] Ratnawati, K. 2004. Pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya Paternalistik dan Komitmen Organisasi sebagai Moderating Variabel. *Simposium Nasional Akuntansi 7*
- [20] 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan Jakarta
- [21] Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
_____. 2005. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.
- [22] Sadjiarto Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah, *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol 2, Nopember 2000: 138-150
- [23] Sarjito, Bambang. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*.
- [24] Samuel Abel Tanta Sembiring. 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- [25] Sifarif, Dido Peto 2011. Pengaruh *Budgetary Goal Characteristic* Terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Padang Sumatra Barat. . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- [26] Suwandi, Annisa Pratiwy., 2013. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD pemerintah kota padang). Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu Universitas Negeri Padang
- [27] Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tesis. Universitas Sumatera Utara
- [28] Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: PT. Alfabeta

5. Kesimpulan

Partisipasi penyusunan anggaran sangat berpengaruh dan signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi partisipasi dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan informasi yang efektif antara atasan dengan bawahan, sehingga komunikasi antara atasan dengan bawahan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu kinerja aparat pemerintah juga dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran secara positif dan signifikan, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyusun target-target anggaran.

Penelitian kedepan dapat menambah beberapa variabel independen, moderating, dan intervening yang mungkin berpengaruh dalam melakukan penelitian tentang kinerja aparat pemerintah daerah. Perlunya pemisahan tugas yang jelas dari pelaksana anggaran untuk menghindari adanya peran ganda pada masing-masing staf, sehingga dapat berkurangnya peristiwa kecurangan dalam melaksanakan tugas

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifah Nur Sabrina. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah dengan Budaya dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. Universitas Muhammadiyah.
- [2] Bangun, Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- [3] Arifin, Solikhun. 2012. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: komitmen organisasi, budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Universitas Diponegoro.
- [4] Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat Jakarta.
- [5] Budi Astuti. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Pimpinan Dalam Pelaksanaan Program di SKPD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. Universitas Negeri Padang.
- [6] Coryanata Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*.
- [7] Darma, E.S. 2004 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah. SNA VII, Denpasar
- [8] Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung). *Tesis*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [9] Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE
- [10] Kenis. 1979. *Effects on Budgetary Goal 5 Characteristic on Managerial Attitude and Performance, The Accounting Review*.